

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Muhammad Muchtar¹, M.Faisal Abdullah², Dwi Susilowati³

Abstrac *The increase of the local government revenue has been a great concern since more and more authority has been delegated to the local government. Therefore, the potential sources of local revenue such as the regional taxes and levies should be explored at a maximum level, but of course according to the corridor of legislation, including the motor vehicle taxes (PKB) which indeed have long become a major element of the PAD. However, the pattern of this PKB contribution to PAD of the local government, in particular the North Barito District Government has not been intensively studied. For such reason, this study was designed to determine: 1) the PKB contribution to North Barito District PAD during the period of 2012 - 2016, and 2) the potential of PKB contribution to South Sulawesi PAD from 2012 to 2016.*

Keywords : PAD, PKB contribution, and PKB realization

Abstrak Tuntutan peningkatan PAD yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Untuk itu, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk didalamnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. Walaupun demikian, pola kontribusi PKB terhadap PAD Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, belum banyak dikaji. Untuk itu, penelitian didesain untuk mengetahui berapa besar: 1) Kontribusi PKB terhadap PAD Kabupaten Barito Utara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016; dan 2) Jenis kendaraan bermotor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Kata kunci: PAD, Kontribusi PKB, dan Realisasi PKB.

Pendahuluan

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah dan tingkat pengangguran yang tinggi serta pertambahan penduduk yang terus meningkat (Arifin, 2010). Dengan era yang sedang berkembang, maka otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki, guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Reformasi pajak kendaraan bermotor telah dilaksanakan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak (*self assesment system*) dengan ketentuan baru yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan asli daerah dalam hal ini melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), yang gunanya untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. (Yunus & Thalib, 2010)

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu

¹Mahasiswa Jurusan IESP Fakultas Ekonomi & Bisnis UMM Email: Mchtr6394@gmail.com

² [Universitas_Muhammadiyah_Malang_Malang] Email: faisal@umm.ac.id

³ [Universitas_Muhammadiyah_Malang_Malang] Email: dwisusilowati@umm.ac.id

indikator penting dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi. (Nuraini, 2017). Akan tetapi pada kenyataannya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. (Arifin, 2010).

Kabupaten Barito Utara dengan perekonomian yang sedang berkembang mempunyai penghasilan daerah yang besar salah satu sumber penerimaan terbesar Kabupaten Barito Utara adalah dari sektor pajak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menunjang penerimaan bagi pemerintah daerah melalui pembagian pajak pusat untuk menunjang penerimaan di daerah. Diantaranya, melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Tapi masih banyak pajak yang tidak efektif dipungut dikarena suatu alasan sehingga menghambat pendapat daerah tersebut. Sebagai daerah otonomi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu sumber daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar.

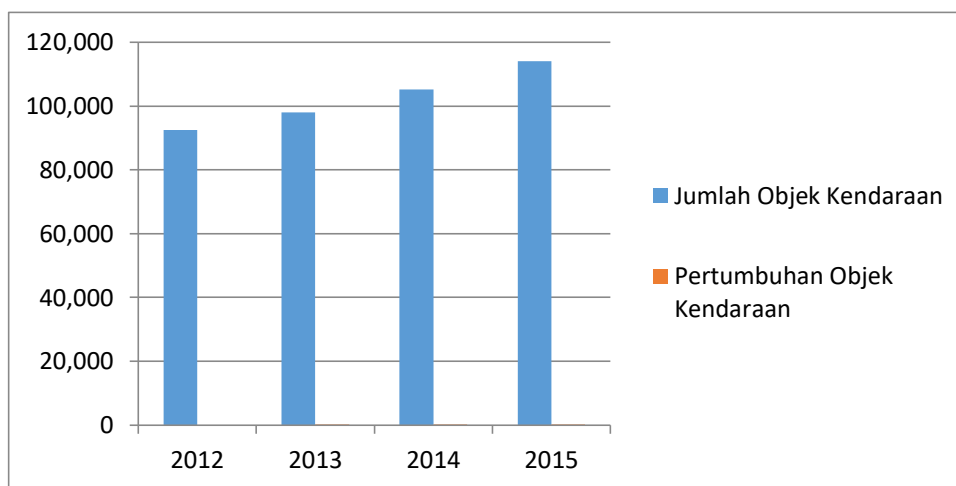
Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah, menggambarkan kemampuan daerah dalam melihat potensi keuangannya. Kantor Dinas Pendapatan Daerah bertugas untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat. Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tiap-tiap periode. Jika laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat maka dapat dikatakan bahwa sebuah pemerintahan melakukan tugasnya dengan baik.

Motivasi penulis untuk menulis judul skripsi ini karena penulis melihat semakin berkembangnya daerah Kabupaten Barito Utara maka secara tidak langsung semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dibutuhkan masyarakat serta mengetahui sejauh mana kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Utara.

Tabel 1. Jumlah Objek Kendaraan Bermotor Kabupaten Barito Utara

Tahun	Jumlah Objek Kendaraan	Pertumbuhan Objek Kendaraan (%)
2012	92.464	-
2013	97.970	6%
2014	105.180	7%
2015	114.121	9%
2016	115.032	1%

Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten Barito Utara, 2017

Grafik 1. Jumlah Objek Kendaraan Bermotor Kabupaten Barito Utara

Sumber : Data Olahan Microsoft Excel

Berdasarkan tabel grafik 1 menunjukkan bahwa jumlah objek kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan atau memenuhi jumlah target objek pajak dari tahun ke tahun, bisa dilihat dari tabel di atas yang dimana pada tahun 2012 sebesar 6%, 2013 sebesar 7%, 2014 sebesar 9%, dan 2015 sebesar 1%. Pada tahun 2015 peningkatannya hanya 1% dikarenakan jumlah objek pajak pada tahun 2015-2016 hanya meningkat sebesar 991 objek pajak. Dari meningkatnya jumlah objek kendaraan bermotor setiap tahunnya yang nantinya dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Utara.

Berikut lima penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah ini. Pertama (Anwar, 2014) meneliti tentang Analisis Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2012). Penelitian ini menggunakan model regresi kuadrat terkecil. Hasilnya PKB Provinsi Sulawesi Selatan sangat memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi

Sulawesi Selatan dengan kontribusi yang lumayan tinggi yaitu sebesar 25,7% sampai dengan 29,6% untuk kurun waktu selama lima tahun.

(Udjianto, 2007) meneliti tentang Efisiensi Pajak Daerah suatu tinjauan Elastisitas (Studi Kasus di Kota Yogyakarta 2001-2005). Penelitian ini menggunakan model regresi klasik. Hasil dari penelitian ini yaitu penerimaan pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dan penerangan jalan sudah efisien dan elastisitas dari masing-masing pajak tidak peka terhadap penerimaan pajak selama periode 2001-2005, jadi dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak di kota Yogyakarta belum optimal mengelola jenis pajak serta masih terjadi elastisitas basis pajak terhadap pendapatan masyarakat.

(Sulistiyawati, 2008) meneliti tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif yang menggunakan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang tidak efektif, walaupun pada efisiensi kinerja pemerintahan sudah efisien. Hasil perhitungan yang demikian dapat terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terlalu rendah dalam menentukan ukuran potensinya.

(Nanda, 2012) meneliti tentang Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis rasio, DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal), Elastisitas PAD. Hasil dari analisis rasio menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan Pajak di kota Madiun terbesar yaitu pada tahun 2011 mencapai 1,55 atau 155% dari target yang telah ditentukan, tingkat efisiensi pemungutan pajak di kota Madiun sudah efisien hal ini ditunjukkan dari rasio biaya pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak rata-rata sebesar 0,7%, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah berasal dari pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN mencapai rata-rata sebesar 53,92%.

(Vita, 2013) meneliti tentang Analisis Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengujian hipotesis menggunakan analisis perbandingan manual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah efektif dan efisien terhadap pendapatan asli daerah.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penulis ingin melihat seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Barito

Utara, Kalimantan Tengah untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan seberapa besar potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dari tahun 2014 sampai 2016.

Pajak mempunyai peran yang sangat vital untuk proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut buku-buku tentang perpajakan, ada dua macam fungsi pajak yaitu sebagai penerimaan (*budgetair*) dan mengatur (*regulair*). Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Dua jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan fungsi *regulair* merupakan fungsi tambahan dari pajak, yaitu pengatur atau pelaksana kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dalam fungsi ini, pajak fungsinya untuk mengarahkan perilaku warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Contohnya, agar warga negara tidak mengonsumsi minuman beralkohol, maka jenis barang ini dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tinggi. (Damang, 2011)

Menurut (Undang-undang No. 33 , 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya masih belum mampu memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan daerah. Ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut penjelasan (Undang-undang No. 33 , 2004) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

Wajib Pajak Adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Implikasi langsung dari pemberian tanggung jawab tersebut adalah daerah membutuhkan dana yang semakin besar untuk memenuhi pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sejalan dengan pemberian fungsi tersebut juga telah dilakukan pembagian sumber-sumber keuangan yang menjamin agar semua daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah diatur bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito Utara yang bertempat di jalan Yetro Sinseng No. 2 Muara Teweh. Lokasi ini dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi

yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif. Studi deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi atau lainnya (Sekaran, 2010:159). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta potensi dan realisasi PKB periode 2012-2016.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito Utara. Jenis Data yang digunakan dalam bentuk:

1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara
2. Data Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Barito Utara
3. Data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu teknik analisis data yang berbentuk laporan yang diterima dan dikumpulkan serta dianalisis sehingga mendapatkan kesimpulan yang benar.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif karena peneliti menganalisis data yang sebagai indikator adalah penerimaan kas, yang digunakan untuk memperoleh gambaran penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Utara serta sebagai dasar proyeksi pendapatan asli daerah. Kemudian data diolah sehingga nantinya dapat menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang di ajukan dalam penelitian.

Berikut adalah langkah-langkah dalam menganalisis data yang telah diperoleh :

1. Mengidentifikasi data penerimaan pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :
 - a. Menghitung besar penerimaan pajak kendaraan bermotor
 - b. Menghitung laju pertumbuhan PKB tiap tahun.

$$TK = \frac{(N(t) - N(t-1))}{N(t-1)} \times 100\%$$

Sumber : Data Diolah

Keterangan :

TK = Penerimaan pajak kendara bermotor dari tahun yang bersangkutan.

$N(t)$ = Data penerimaan pajak kendaraan bermotor bahan tahun bersangkutan.

$N(t-1)$ = Data penerimaan pajak kendaraan bermotor satu tahun sebelumnya.

- c. Menghitung rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor daerah Kabupaten Barito Utara.

$$xTK = \frac{\sum TK}{N}$$

Keterangan :

xTK = Rata-rata tingkat kenaikan realisasi

$\sum TK$ = Jumlah kenaikan realisasi

N = Jumlah tahun

- d. Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD.

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

X = Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Z = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

2. Menyimpulkan hasil pengolahan data pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Utara terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil dan Pembahasan

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Barito Utara dari tahun 2012 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan. Berikut ini adalah data tentang pencapaian yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito Utara tentang pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Utara.

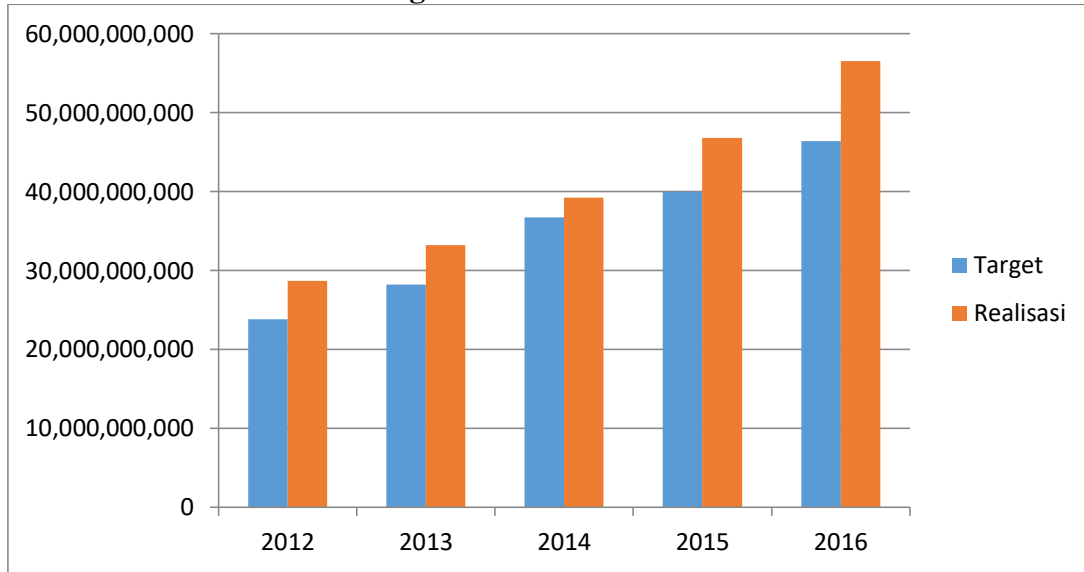
Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito Utara

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	23.841.525.663	28.659.369.690	120,21
2013	28.200.000.000	33.237.186.874	117,84
2014	36.733.528.000	39.256.776.785	106,87
2015	39.970.930.000	46.839.683.128	117,18

2016	46.401.029.094	56.578.989.296	121,93
------	----------------	----------------	--------

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito Utara

Grafik 1 Target dan Realisasi Penerimaan PAD



Sumber : Data Olahan Microsoft Excel

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat target penerimaan PAD Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun selalu mengalami peningkatan begitu pula dengan realisasi yang diterima juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disebabkan karena semakin bagusnya infrastruktur dan kebijakan yang sudah berlaku sehingga dengan sendirinya mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012-2016.

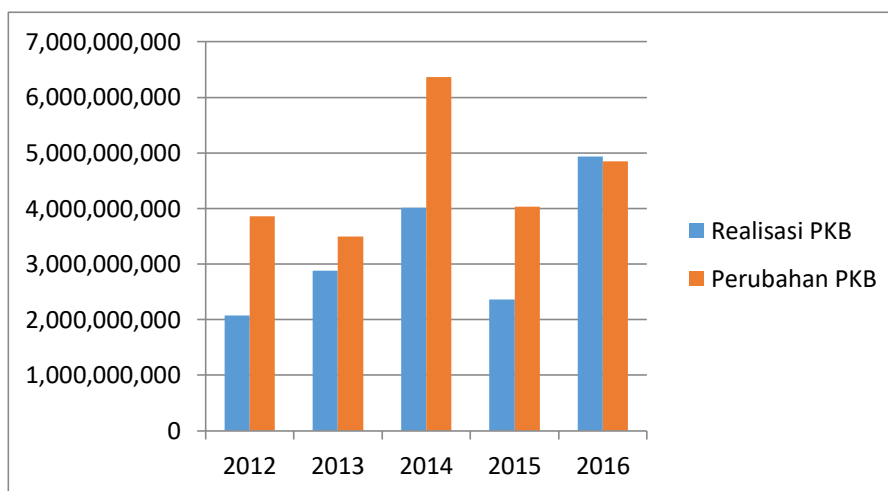
Berikut ini adalah data tentang realisasi serta pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai dengan 2016 yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito Utara.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2016
Tahun Realisasi PKB Perubahan PKB Pertumbuhan Per-Tahun (%)

2012	2.070.884.961	3.863.614.641	53,60
2013	2.878.685.310	3.491.277.152	82,45
2014	4.013.453.366	6.370.471.817	63,00
2015	2.358.609.148	4.030.252.027	58,52
2016	4.936.906.706	4.852.347.039	101,74

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito Utara

Grafik 2 Realisasi dan Perubahan Penerimaan PKB



Sumber : Data Olahan Microsoft Excel

Dari tabel grafik 2 di atas dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah pendapatan daerah setiap tahunnya dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu peningkatan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor. Pendapatan pajak kendaraan bermotor yang terendah pada tahun 2012 senilai 2.070.884.961 sehingga pencapaian pendapatan asli daerah sebesar 28.659.369.690. Kemudian pendapatan pajak kendaraan bermotor tertinggi yaitu pada tahun 2016 senilai 4.936.906.706 sehingga pencapaian pendapatan asli daerah sebesar 56.578.898.296. Realisasi penerimaan PKB dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sulitnya akses jalan dari desa ke kota, sehingga masyarakat desa di Kecamatan Barito Utara susah untuk membayar pajak setiap tahunnya.

Rata-rata kenaikan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor data dihitung menggunakan rumus :

$$xTK = \frac{\Sigma TK}{N}$$

Keterangan :

xTK = Rata-rata tingkat kenaikan realisasi

ΣTK = Jumlah kenaikan realisasi

N = Jumlah tahun

$$xTK = \frac{53,60+82,45+63,00+58,52+101,74}{4} = 89,82\%$$

Dari perhitungan tingkat kenaikan realisasi diatas yang diperoleh dari laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor diperoleh hasil tingkat kenaikan realisasi sebesar 89,82% menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk PAD Kabupaten Barito Utara sudah baik dan harus ditingkatkan terus pembangunannya guna meningkatkan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Kontribusi adalah tingkat kemampuan suatu pajak kendaraan bermotor dalam menunjang pendapatan asli daerah. Kontribusi dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan :

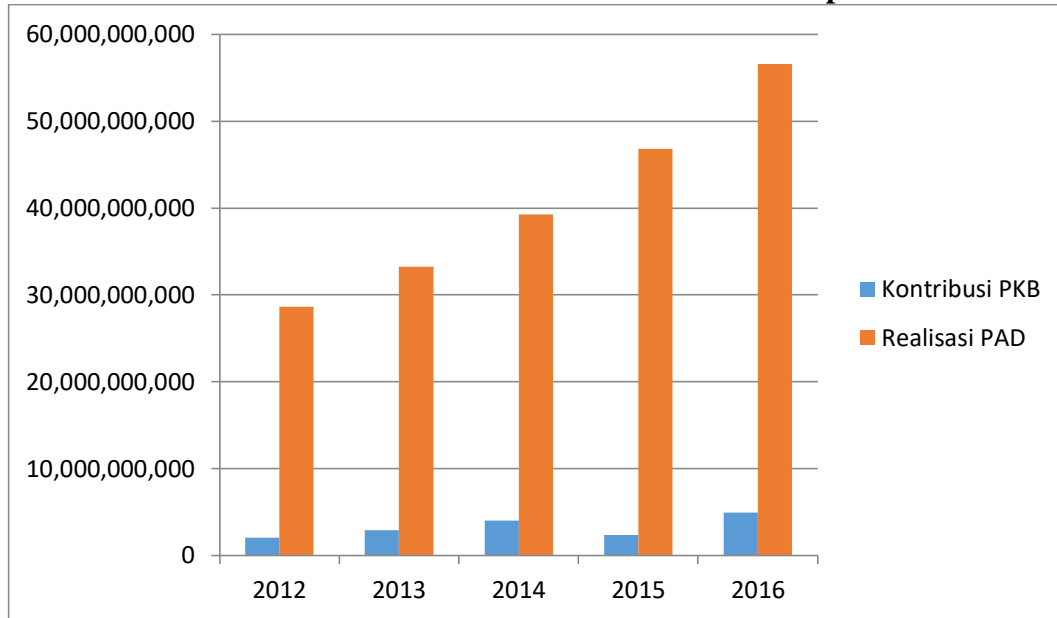
X = Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Z = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3 Kontribusi Penerimaan PKB Terhadap PAD Kabupaten Barito Utara

Tahun	Kontribusi PKB	Realisasi PAD	Kontribusi Per-Tahun (%)
2012	2.070.884.961	28.659.369.690	7,22
2013	2.878.685.310	33.237.186.874	8,65
2014	4.013.453.366	39.256.776.785	10,22
2015	2.358.609.148	46.839.683.128	5,03
2016	4.936.906.706	56.578.989.296	8,72
	Rata – rata		7,96

Sumber : Data Olahan Microsoft Excel

Grafik 3 Kontribusi Penerimaan PKB Terhadap PAD

Sumber : Data Olahan Microsoft Excel

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor telah mampu memberikan kontribusi bagi PAD. Dimana realisasi yang diterima oleh PAD Kabupaten Barito Utara tidak hanya dari penerimaan pajak kendaraan bermotor saja, tetapi dari beberapa sektor pajak lainnya yaitu dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah lainnya, sehingga kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD pada tahun 2012 sebesar 7,22%, tahun 2013 sebesar 8,65%, tahun 2014 sebesar 10,22%, tahun 2015 sebesar 5,03%, dan tahun 2016 sebesar 8,72%. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor sebesar 8,72% karena dilihat dari tingkat realisasi PAD yang diterima cukup tinggi sebesar Rp.56.578.989.296 itu karena dipengaruhi oleh beberapa sektor pendapatan pajak dan retribusi daerah lainnya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito Utara yang berpengaruh terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Utara selama lima tahun terakhir sebesar 7,96%. Dimana pada tahun 2012 pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 7,22%, selanjutnya di tahun 2013 sebesar

8,65%. Pada tahun 2014 naik sebesar 10,22%, selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 5,03% dan 8,72%. Ini membuktikan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Barito Utara relatif stabil dari tahun ke tahunnya, meskipun peningkatannya tidak selalu signifikan setiap tahunnya.

2. Berdasarkan hasil penerimaan dari jenis-jenis pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2012 sampai dengan 2016, pajak kendaraan bermotor jenis Scooter mampu memberikan kontribusi terbanyak bagi pajak kendaraan bermotor Kabupaten Barito Utara dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan rata-rata kontribusi sebesar 46,86%. Selanjutnya untuk kontribusi kedua paling besar yaitu dari jenis Truck dan Pick Up (pribadi) yaitu rata-rata kontribusi sebesar 22,61%. Selanjutnya kontribusi dari jenis kendaraan khusus (pribadi) yaitu sebesar 15,73%. Dari jenis Sedan, Jeep, Station Wagon (pribadi) sebesar 12,91% diikuti oleh jenis Truck, Pick Up (umum) 0,89%, selanjutnya dari Bus, Micro Bus (umum) 0,31% dan 0,17% dari Bus, Micro Bus (pribadi). Dan kontribusi terakhir diberikan oleh jenis Sedan, Jeep, Station Wagon (umum) 0,05% dan jenis kendaraan bermotor di atas air sebesar 0,00197%.

Dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah sangat baik. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik didukung dengan kinerja yang baik juga, sehingga dari tahun ke tahun selalu memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik dan terus memenuhi target sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan PAD. Dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor mampu memberikan kontribusinya untuk meningkatkan PAD. Dari PAD tersebut nantinya akan digunakan atau dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah ataupun pada provinsi. Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian, di antaranya adalah Data yang di butuhkan sangat terbatas, hanya lima tahun. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran:

1. Disarankan kepada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito agar dapat mempertahankan kebijakan yang sudah diterapkan untuk kemakmuran seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Utara.

2. Disarankan kepada Kantor SAMSAT Kabupaten Barito Utara agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan bersama.
3. Disarankan kepada SAMSAT Kabupaten Barito Utara agar dapat bertindak tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi berupa denda.
4. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Economic Resources*, 11(30) : hal 91-99).
- Arifin, Z. 2010. *Analisis perbandingan perekonomian pada empat koridor di provinsi jawa timur*. Jurnal UMM.
- _____. 2010. *Analisis pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di provinsi jawa tengah*. Jurnal UMM.
- Damang, 2011, Pajak Kendaraan Bermotor, Cetakan kedua, Gramedia, Jakarta.
- Khaeril Anwar J. 2014. "Analisis Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2012). *Skripsi*. FEB. Universitas Hasanudin Makasar.
- Nanda. 2012. "Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota masiun". *Skripsi*. FEB. Universitas Islam Indonesia.
- Nuraini, I. 2017. *Kualitas pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di jawa timur*. Jurnal UMM.
- Peraturan Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Sulistiyawati. 2008. "Analisis efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak hote dan pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli kota malang". *Skripsi*. FEB. Universitas Negeri Malang.
- Udjianto. 2007. "Efisiensi pajak daerah tinjauan elastisitas". *Skripsi*. FEB. Universitas Admadjaya.
- Vita. 2013. "Analisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota tasimalaya". *Skripsi*. FEB. Universitas Padjajaran.
- Yunus dan Abdul Thalib, 2010, Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Economic Resources*, 11(30) : hal 91-99